

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, PT Citra Adya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- A. Plito, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arif, Intermasa, Jakarta, 1978.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakaraya Jakarta, 2012.
- Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2015.
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Hazarin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1992.
- Henry Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat- Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Pribadi: bagian I Persoon Alamiah*, cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1999.

- Kusumaningrum, S, *Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia*, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Jakarta, 2016.
- Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Ridwan H.R., *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika Jakarta, 2013.
- Rusli, An R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984.
- Siagian Sondang, *P. Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Haji Masagung, 1990.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 15, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1., PT. Pustaka Prisma, Yogyakarta, 2007.
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976.

J. Jurnal/ Website

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, Ihya' Ulumuddin, Beirut: Dar al Fikr.

Afhami, S., & Mashdurohatun, A. *The Laws on "Sirri Married and Ints Impact. The 2nd Procedding "Indonesia Clean of Corruption in 2020"*.

Bowontari, S., *Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya*. Lex Privatum, 7(4), 2019

Dliyaul Haq, "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan".

ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/download/723/716.

Esti, R. Shimada, Y., Gunarto, G., & Anis, M, *The essence of sharing joint property as a result of divorce*. Awang Long Law Reviewer, 1(2), 2019.

Faizal, L. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. ASAS, 8(2), 2016.

Jafar, "Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,".

Hamzani, A. I. *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Konstitusi, 12(1), 2016.

Husnulwati, Sri. *Pencatatan Sipil dalam tinjauan hukum perdata*. Vol 16, Nomor 2, 2018.

Idha Mutiara, "Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan", Skripsi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

Kasdu, *Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan*, Jakarta, 2001.

Margaretha Eveline, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bekasi*. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

- Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002.
- Mochtar, *Sinopsis Obsetri: Obsetri Fisiologi dan Obsetri Patologi*, 1998.
- Muchsin, *Problematisasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2008.
- Panduan Masyarakat Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2006.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R., *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- VIII/2010*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 2020.
- Pratiwi, “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat,” 56.
- Putri Riskiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran,”.
- Safitri, Suprihatin, and Lis Sulistiani, “Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri,” 44.
- Sanita Dhakirah, “Optimalisasi Pemahaman Masyarakat tentang Akta Kelahiran eazaskan domisili”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Brawijaya, 2014
- Santoso, S. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 2016.
- Septi Putri Riskiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran” UIN Sunan Ampel, 2019.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*.

K. Website

“Apa saja dampak psikologis anak diluar nikah?” <https://www.dictio.id/t/apa-saja-dampak-psikologis-anak-di-luar-nikah/81294/2>

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=71027>

<http://www.google.ur/jurnal/kependudukan/Felisa.ugm.ac.id>

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205711006/bab2.pdf>.

<Http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36987/4/Chapter%20II.pdf>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38193/2/Reference.pdf>

<https://siak-banjar.webs.com/apps/blog/show/6021373-pentingnya-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>

<https://sipp.menpan.go.id/sektor/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/latar-belakang-kebijakan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia>

<https://sipp.menpan.go.id/sektor/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/latar-belakang-kebijakan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia>

Profil Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2022

Seri Demokrasi Elektoral. Meningkatkan Akurasi Pemilih, Mengatur Kembali Sistem Pemutakhiran Data. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. [www://kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id)

<http://www.nasional.tempo.co.amp/KPU> diminta tetapkan mendata meskipun telah ditetapkan dpt. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023., jam 19.23 WIB.

L. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

3.